



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN MELALUI PENGADUAN MASYARAKAT

SEMESTER II TAHUN 2025

INSPEKTORAT BMKG

Jl. Angkasa I No. 02, Kemayoran, Jakarta 10610
Telp. (021) 424 6321 Fax. (021) 424 6703 P.O Box 3540 Jkt
Website: <http://www.bmkg.go.id>

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Penanganan Pelanggaran melalui Pengaduan Masyarakat oleh Inspektorat BMKG Semester II Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara ringkas mengenai pelaksanaan pengawasan intern yang telah dilakukan, hasil yang dicapai, serta permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan, khususnya dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di lingkungan BMKG.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mendorong peningkatan efektivitas pengawasan internal.

Jakarta, Januari 2026

Inspektur BMKG



Nasrul Wathon

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN	4
BAB I. INFORMASI UMUM	5
A. Dasar Hukum	5
B. Struktur Organisasi	5
C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan	5
D. Program Pengawasan dan Realisasinya	5
BAB II. INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN MELALUI PENGADUAN MASYARAKAT	6
A. Jumlah dan Jenis Pengaduan Masyarakat	6
B. Status Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	7
BAB III. SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI	7
A. Simpulan	7
B. Hambatan	8
C. Rekomendasi	8
LAMPIRAN	9

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Pada Semester II Tahun 2025, Inspektorat BMKG telah melaksanakan pengawasan sesuai mandat PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Kegiatan pengawasan mencakup audit operasional, revidi laporan, monitoring & evaluasi, pemantauan tindak lanjut, reformasi birokrasi, serta **penanganan pengaduan masyarakat**.

Secara khusus terkait pengaduan masyarakat sampai dengan 31 Desember 2025, Inspektorat BMKG menerima **0 pengaduan**. Artinya tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat BMKG pada periode ini.

Hal ini menunjukkan komitmen Inspektorat dalam menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BMKG. Jenis pelanggaran yang diterima dan akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat BMKG diantaranya sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Wewenang
2. Pelayanan Masyarakat
3. Korupsi/ Pungli
4. Kepegawaian/ Ketenagakerjaan
5. Pertanahan/ Perumahan
6. Hukum/ Peradilan dan HAM
7. Kewaspadaan Nasional
8. Tatalaksana/ Regulasi
9. Lingkungan Hidup
10. Umum

BAB I. INFORMASI UMUM

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3. Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP.
4. Peraturan BMKG Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
5. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat BMKG Tahun 2025.

B. Struktur Organisasi

Inspektorat BMKG dipimpin oleh seorang Inspektur yang membawahi Jabatan Fungsional Auditor dan Sub Bagian Tata Usaha, dengan fungsi utama melaksanakan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan

1. Menyediakan gambaran menyeluruh mengenai hasil pengawasan Inspektorat BMKG.
2. Menyajikan informasi perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Menjadi dasar rekomendasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan strategis.

D. Program Pengawasan dan Realisasinya

Penanganan pengaduan masyarakat merupakan Program Non-PKPT, sehingga tidak ada target yang ditetapkan dan penugasan dilakukan apabila ada pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal pengaduan yang telah disediakan.

BAB II. INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN MELALUI PENGADUAN MASYARAKAT

A. Jumlah dan Jenis Pengaduan Masyarakat

Penanganan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan oleh Inspektorat BMKG adalah penanganan kasus yang diterima langsung oleh APIP dalam hal ini adalah menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas perintah Inspektur. Pemeriksaan khusus dilakukan terhadap kasus-kasus yang terkait kegiatan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan ataupun perbuatan-perbuatan Aparatur Sipil Negara yang memberi citra buruk bagi institusi BMKG.

Jenis pelanggaran yang diterima dan akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat BMKG diantaranya sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Wewenang
2. Pelayanan Masyarakat
3. Korupsi/ Pungli
4. Kepegawaian/ Ketenagakerjaan
5. Pertanahan/ Perumahan
6. Hukum/ Peradilan dan HAM
7. Kewaspadaan Nasional
8. Tatalaksana/ Regulasi
9. Lingkungan Hidup
10. Umum

Berdasarkan hasil dari Tindak Lanjut Penanganan atas Pengaduan Masyarakat Periode Semester II Tahun 2025 hingga Tanggal 31 Desember 2025 diketahui bahwa, terdapat **pengaduan sebanyak 0 kasus**. Artinya tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat BMKG pada periode ini.

NO.	JENIS SUBSTANSI PENGADUAN	JUMLAH PENGADUAN	%
		SEMESTER II 2025	
1.	Penyalahgunaan Wewenang	0	0
2.	Pelayanan Masyarakat	0	0
3.	Korupsi/ Pungli	0	0
4.	Kepegawaian/ Ketenagakerjaan	0	0
5.	Pertanahan/ Perumahan	0	0
6.	Hukum/ Peradilan dan HAM	0	0
7.	Kewaspadaan Nasional	0	0
8.	Tatalaksana/ Regulasi	0	0
9.	Lingkungan Hidup	0	0
10.	Umum	0	0
Jumlah		0	0

Sumber: Inspektorat BMKG

B. Status Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Dikarenakan jumlah 0 kasus pengaduan pada Semester II Tahun 2025, sehingga tidak ada bentuk tindak lanjutnya.

BAB III. SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Pada Semester II Tahun 2025, Inspektorat BMKG menerima 0 kasus pengaduan masyarakat.
2. Tidak ada bentuk tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

B. Hambatan

1. Tidak ada

C. Rekomendasi

1. **Peningkatan Mekanisme Verifikasi Awal:** memperkuat sistem validasi aduan dengan kriteria minimal (contoh: identitas pelapor, bukti awal yang jelas), sehingga hanya pengaduan layak yang masuk tahap pemeriksaan khusus.
2. **Monitoring dan Evaluasi Berkala:** menyusun laporan tren pengaduan setiap semester sebagai dasar strategi pencegahan munculnya aduan palsu serta masukan kebijakan peningkatan integritas layanan publik di BMKG.

LAMPIRAN

Rekap Jenis Pelanggaran dalam Pengaduan Masyarakat Semester II Tahun 2025

DASHBOARD INFORMASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BMKG

Rekap Kejadian Pengaduan BMKG Tahun: 2025 Semester 2

Jumlah Kejadian Pengaduan

0

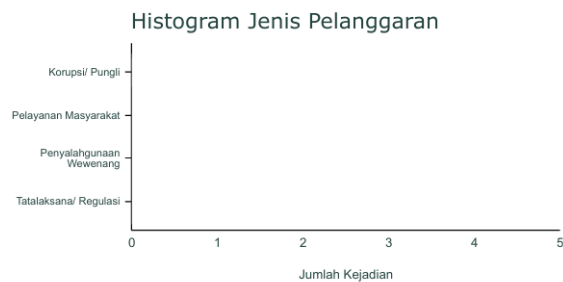
Status TL Proses

0

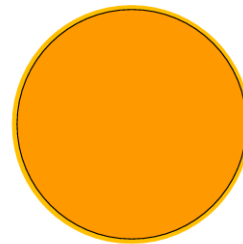
Status TL Selesai

0

Histogram dan Persentase Berdasarkan Jenis Pelanggaran



Persentase Jenis Pelanggaran



Tindak Lanjut Atas Pengaduan

Mengirimkan Surat Balasan

0

Klarifikasi

0

Tindakan Hukum

0